

A. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPA

2016

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2016

Jl. Budi Utomo. No. 6
Jakarta - 10710



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2017
Kepala,

Wulandari, CPA,MBA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	Daftar Isi	ii	Daftar Tabel	iii	x
Daftar Isi						x
Pernyataan Telah Direviu						x
Pernyataan Tanggung Jawab	iv	Ringkasan	1			x
Ringkasan						x
I. Laporan Realisasi Anggaran	3					x
II. Neraca	4					x
III. Laporan Operasional						x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas						x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5					x
A. Penjelasan Umum						x
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran						x
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca						x
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional						x
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas						x
F. Pengungkapan Penting Lainnya						x
VI. Lampiran dan Daftar						

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk tahun anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2017

Hermawan, CA, CPA

Nip.1965082519851001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2017
Kepala,

Wulandari, CPA,MBA

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.850.000.000 atau mencapai 126,67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.250.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp90.812.700.000 atau mencapai 97,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp93.300.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp96.610.357.500 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.664.116.750; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp763.000.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp84.682.240.750; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.501.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.919.779.000 dan Rp91.690.578.500.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.014.600.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp59.905.899.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp55.891.299.000. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp38.000.000 dan Rp395.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp56.248.299.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp56.914.378.500, ditambah Defisit-LO

sebesar Rp56.248.299.000, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp3.061.799.000 dan transaksi antarentitas senilai total Rp87.962.700.000, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp91.690.578.500.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.250.000.000	2.850.000.000	126,67	1.950.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.250.000.000	2.850.000.000	126,67	1.950.000.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	19.000.000.000	18.457.200.000	97,14	19.200.000.000
Belanja Barang	B.4	40.400.000.000	39.851.000.000	98,64	37.050.000.000
Belanja Modal	B.5	33.300.000.000	31.904.300.000	95,81	18.690.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	600.000.000	600.200.000	100,03	420.000.000
JUMLAH BELANJA		93.300.000.000	90.812.700.000	97,33	75.360.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	18.000.000	6.000.000
Kas pada BLU	C.3	990.000.000	150.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	120.000.000	54.000.000
Investasi Jangka Pendek BLU	C.5	357.500.000	112.540.000
Piutang PNPB	C.6	450.500.000	332.100.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	216.000.000	144.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	72.000.000	57.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	(15.377.500)	(9.668.500)
Belanja Dibayar di Muka	C.10	811.644.000	773.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	483.850.250	653.120.000
Persediaan	C.12	5.100.000.000	4.273.100.000
Jumlah Aset Lancar		8.664.116.750	6.545.791.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	432.000.000	244.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	344.000.000	257.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	(13.000.000)	(10.108.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		763.000.000	491.492.000
ASET TETAP			
Tanah	C.16	36.300.000.000	18.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.17	12.983.885.000	6.300.000.000
Gedung dan Bangunan	C.18	47.970.000.000	42.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	2.040.000.000	300.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.20	630.000.000	540.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	2.250.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(17.491.644.250)	(14.111.664.250)
Jumlah Aset Tetap		84.682.240.750	53.028.335.750
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	1.690.000.000	1.045.700.000
Aset Lain-Lain	C.24	1.174.000.000	540.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(363.000.000)	(180.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		2.501.000.000	1.405.700.000
JUMLAH ASET		96.610.357.500	61.471.319.250
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	60.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	423.000.000	254.000.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.28	337.079.000	186.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	288.400.000	141.286.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	925.000.000	651.935.500
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	354.500.000	455.440.250
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.387.979.000	1.688.661.750
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.32	2.531.800.000	2.868.879.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.531.800.000	2.868.879.000
JUMLAH KEWAJIBAN		4.919.779.000	4.557.540.750
EKUITAS			
Ekuitas	C.33	91.690.578.500	56.914.378.500
JUMLAH EKUITAS		91.690.578.500	56.914.378.500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		96.610.357.500	61.471.919.250

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNBP Lainnya		1.539.000.000	1.351.000.000
Pendapatan Badan Layanan umum		2.475.600.000	2.262.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		4.014.600.000	3.613.000.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	19.820.000.000	18.239.450.000
Beban Persediaan	D.3	12.000.000.000	13.215.000.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.614.000.000	6.142.000.000
Beban Pemeliharaan	D.5	5.200.000.000	2.015.400.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	9.087.000.000	6.745.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	3.857.000.000	3.684.100.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	600.200.000	750.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.703.000.000	2.154.800.000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	24.699.000	10.250.000
JUMLAH BEBAN		59.905.899.000	52.956.000.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(55.891.299.000)	(49.343.000.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		72.000.000	66.300.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(9.000.000)	-
Defisit Selisih Kurs		(24.000.000)	(22.500.000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		10.000.000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(11.000.000)	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		38.000.000	43.800.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(55.853.299.000)	(49.299.200.000)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		95.000.000	195.400.000
Beban Perjalanan Dinas		(198.000.000)	(150.000.000)
Beban Luar Biasa		(292.000.000)	(305.100.000)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(395.000.000)	(259.700.000)
SURPLUS/DEFISIT LO		(56.248.299.000)	(49.558.900.000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	56.914.378.500	30.664.198.500
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(56.248.299.000)	(49.558.900.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	385.000.000
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	873.685.000	764.580.000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	638.114.000	350.000.000
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	523.885.000	(125.000.000)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	576.115.000	1.024.500.000
JUMLAH		2.611.799.000	2.399.080.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	88.412.700.000	73.410.000.000
EKUITAS AKHIR	E.5	91.690.578.500	56.914.378.500

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor: 6, Jakarta Pusat.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi pemerintahan pusat dan pemberian bimbingan serta dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui impementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual”***.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem informasi yang yang andal dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BAPK) terdiri dari 4 Deputi yaitu:

1. Sekretariat Utama

Deputi yang bertanggungjawab berkenaan dengan administrasi dan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa.
2. Deputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
3. Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi

Bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi.
4. Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bertanggungjawab terhadap pembinaan sistem dan kebijakan akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian jumlah satker pada masing-masing eselon I adalah sebagai berikut:

No.	Eselon I	Satker
1	Deputi Administrasi BAPK	12
2	Deputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	2
3	Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi	1
4	Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5
Jumlah		20

Termasuk di dalam jumlah satker pada Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah dua satker BLU yaitu BLU Pusat Akuntansi dan Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LR

(1) Pendapatan- LRA

A

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi

akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	2.100.000.000	2.100.000.000
Pendapatan Lain-lain	150.000.000	150.000.000
Jumlah Pendapatan	2.250.000.000	2.250.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	19.000.000.000	19.000.000.000
Belanja Barang	55.500.000.000	40.400.000.000
Belanja Modal	17.500.000.000	33.300.000.000
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	600.000.000
Jumlah Belanja	92.600.000.000	93.300.000.000

Sedangkan apabila dilihat dari program BAPK maka perubahannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Percepatan Implemetasi Akuntansi Berbasis Akrua	40.700.000.000	40.600.000.000
Program Manajemen dan Dukungan TI di Bidang Pelaporan Keuangan	31.400.000.000	32.000.000.000
Program Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Akuntansi pada KL	20.500.000.000	20.700.000.000
Total Belanja	92.600.000.000	93.300.000.000

Realisasi
Pendapatan
Rp2.850.000.000

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.850.000.000

atau mencapai 126,67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.250.000.000. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2.100.000.000	2.285.000.000	108,81
Pendapatan Lain-lain	150.000.000	565.000.000	376,67
Jumlah	2.250.000.000	2.850.000.000	126,67

Realisasi Pendapatan TA 2016 di atas estimasi pendapatan disebabkan oleh bertambahnya permintaan jasa pelatihan akuntansi dan manajemen dari yang direncanakan. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015 terdapat kenaikan sebesar 15,38 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Jasa Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Manajemen seiring dengan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	2.285.000.000	1.460.000.000	56,51
Pendapatan Lain-lain	565.000.000	490.000.000	15,31
Jumlah	2.850.000.000	1.950.000.000	46,15

Realisasi

Belanja

Rp90.812.700.000

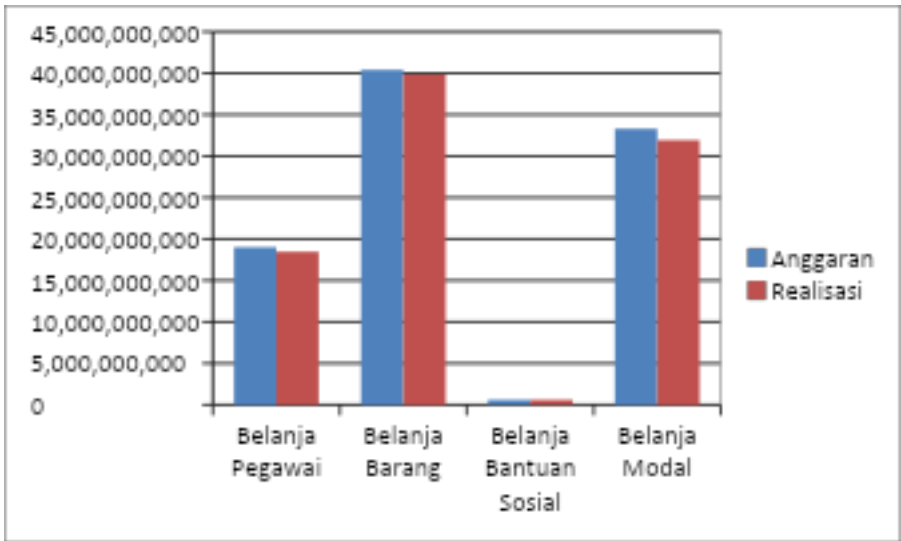
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada TA 2016 adalah sebesar Rp90.812.700.000 atau 97,33% dari anggaran belanja sebesar Rp93.300.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	19.000.000.000	18.607.200.000	97,93
Belanja Barang	40.400.000.000	39.851.000.000	98,64
Belanja Modal	33.300.000.000	31.904.300.000	95,81
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	600.200.000	100,03
Total Belanja Kotor	93.300.000.000	90.962.700.000	97,49
Pengembalian Belanja	-	(150.000.000)	
Total Belanja	93.300.000.000	90.812.700.000	97,33

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2016

PPROGRAM	2016		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Percepatan Implemetasi Akuntansi Berbasis Akrua	39.000.000.000	38.700.000.000	99,23
Program Manajemen dan Dukungan TI di Bidang Pelaporan Keuangan	33.300.000.000	31.412.700.000	94,33
Program Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Akuntansi pada KL	21.000.000.000	20.700.000.000	98,57
Total Belanja	93.300.000.000	90.812.700.000	97,33

Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 20,51% dibandingkan pada TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1. Meningkatnya kebutuhan belanja barang sebagai akibat dari implementasi akuntansi berbasis akrual,
- 2. Pengadaan belanja modal meningkat dalam rangka

mendukung rencana kerja strategis,

- 3. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	18.457.200.000	19.200.000.000	(3,87)
Belanja Barang	39.851.000.000	37.050.000.000	7,56
Belanja Modal	31.904.300.000	18.690.000.000	70,70
Belanja Bantuan Sosial	600.200.000	420.000.000	42,90
Jumlah	90.812.700.000	75.360.000.000	20,51

Belanja

Pegawai

Rp18.457.200.000

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.457.200.000 dan Rp19.200.000.000 atau terjadi penurunan sebesar 3,87% dari TA yang lalu. Penurunan ini disebabkan oleh antara lain berkurangnya jumlah pegawai akibat pensiun.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13.533.000.000	14.440.000.000	(6,28)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.042.000.000	2.100.000.000	(2,76)
Belanja Honorarium	1.350.000.000	820.000.000	64,63
Belanja Lembur	912.200.000	750.000.000	21,63
Belanja Vakasi	770.000.000	1.180.000.000	(34,75)
Jumlah Belanja Kotor	18.607.200.000	19.290.000.000	(3,54)
Pengembalian Belanja Pegawai	(150.000.000)	(90.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	18.457.200.000	19.200.000.000	(3,87)

Belanja Barang

Rp39.851.000.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp39.851.000.000 dan Rp37.050.000.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 7,56 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15.943.500.000	12.300.000.000	29,62
Belanja Barang Non Operasional	2.900.000.000	2.910.000.000	(0,34)
Belanja Jasa	5.300.000.000	4.440.000.000	19,37
Belanja Pemeliharaan	4.200.000.000	6.080.000.000	(30,92)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.457.500.000	7.900.000.000	(5,60)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	4.050.000.000	3.420.000.000	18,42
Jumlah Belanja Kotor	39.851.000.000	37.050.000.000	7,56
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	39.851.000.000	37.050.000.000	7,56

Belanja Modal
Rp31.904.300.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp31.904.300.000 dan Rp18.690.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 70,70% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000.000	4.500.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.250.000.000	3.150.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.740.000.000	1.200.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	614.300.000	840.000.000	(26,87)
Jumlah Belanja Kotor	31.904.300.000	18.690.000.000	70,70
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	31.904.300.000	18.690.000.000	70,70

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp17.700.000.000 dan Rp9.000.000.000. Realisasi Belanja Modal Tanah diperuntukan bagi pendirian Klinik Akuntansi pada Kantor Pusat BAPK serta tanah untuk sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi di kantor vertikal BAPK. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	12.300.000.000	6.100.000.000	101,64
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	1.180.000.000	660.000.000	78,79
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	800.000.000	700.000.000	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	2.140.000.000	1.060.000.000	101,89
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	1.280.000.000	480.000.000	166,67
Jumlah Belanja Kotor	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.600.000.000 dan Rp4.500.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 46.67 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan perangkat komputer dan fasilitas pendukungnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000.000	1.590.000.000	32,08
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	2.400.000.000	1.500.000.000	60,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	700.000.000	410.000.000	70,73
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	1.400.000.000	1.000.000.000	40,00
Jumlah Belanja Kotor	6.600.000.000	4.500.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	6.600.000.000	4.500.000.000	46,67

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.250.000.000 dan Rp3.150.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 66.67 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan gedung

baru untuk Klinik Akuntansi BAPK dan gedung pelatihan pada instansi vertikal BAPK.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2016	T.A 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.000.000.000	2.500.000.000	60,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	400.000.000	150.000.000	166,67
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	350.000.000	250.000.000	40,00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	350.000.000	150.000.000	133,33
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	150.000.000	100.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	5.250.000.000	3.150.000.000	66,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	5.250.000.000	3.150.000.000	66,67

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.740.000.000 dan Rp1.200.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2015.

Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2016	T.A 2015	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	1.560.000.000	1.080.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	180.000.000	120.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	1.740.000.000	1.200.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.740.000.000	1.200.000.000	45,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp614.300.000 dan Rp840.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 26,87 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2015. Hal ini disebabkan ketiadaan

pengadaan belanja modal lainnya, melainkan hanya berupa perbaikan-perbaikan dan *updating*.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2016	T.A 2015	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	494.300.000	770.000.000	-35,81
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	120.000.000	70.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	614.300.000	840.000.000	-26,87
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	614.300.000	840.000.000	-26,87

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp600.200.000*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp600.200.000 dan Rp420.000.000. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Benatuan Sosial
TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Sekretariat Utama	300.200.000	210.000.000	42,95
Penerima Bantuan melalui Deputi Sistem	120.000.000	90.000.000	33,33
Penerima Bantuan melalui Deputi LKPP	180.000.000	120.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	600.200.000	420.000.000	42,90
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	600.200.000	420.000.000	42,90

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Uang Tunai	20.000.000	0
Rekening Bank	40.000.000	0
Jumlah	60.000.000	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp18.000.000

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp18.000.000. dan Rp6.000.000, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Uang Tunai	3.000.000	3.000.000
Rekening Bank	15.000.000	3.000.000
Jumlah	18.000.000	6.000.000

Kas pada BLU
Rp990.000.000

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp990.000.000 dan Rp150.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas di BLU TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Uang Tunai	104.500.000	50.000.000
Rekening Bank	885.500.000	100.000.000
Jumlah	990.000.000	150.000.000

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp120.000.000

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp54.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	16.500.000	8.500.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	35.000.000	20.000.000
Kas Lainnya dari Hibah	68.500.000	25.500.000
Jumlah	120.000.000	54.000.000

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada eselon I disajikan dalam lampiran.

Investasi Jangka
Pendek BLU
Rp357.500.000

C.5 Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada BLU per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp357.500.000 dan Rp112.540.000, merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU,

disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Deposito	262.140.000	112.540.000
SBN	95.360.000	-
Jumlah	357.500.000	112.540.000

Piutang PNB
Rp450.500.000

C.6 Piutang PNB

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp450.500.000 dan Rp332.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNB TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Piutang PNB	350.000.000	300.000.000
Piutang Lainnya	100.500.000	32.100.000
Jumlah	450.500.000	332.100.000

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon I disajikan pada lampiran.

Bag Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp216.000.000

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp216.000.000 dan Rp144.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015

No	Nama	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bagian Lancar TP	100.000.000	50.000.000
2	Bagian Lancar TGR	116.000.000	94.000.000
Jumlah		216.000.000	144.000.000

Rincian TP/TGR untuk masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

Bagian Lancar TPA
Rp72.000.000

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp57.600.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA per eselon I disajikan pada lampiran.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar
Rp15.377.500

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.377.500 dan Rp9.668.500. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA 2016

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	370.500.000	0,50%	1.852.500
Kurang Lancar	80.000.000	10%	8.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	450.500.000		9.852.500
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	181.000.000	0,50%	905.000
Kurang Lancar	35.000.000	10%	3.500.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	216.000.000		4.405.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar	64.000.000	0,50%	320.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	72.000.000		1.120.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	738.500.000		15.377.500

Beban Dibayar
di Muka
Rp811.644.000

C.10 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp811.644.000. dan Rp773.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pembayaran Internet	170.000.000	150.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	350.000.000	320.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	291.644.000	303.000.000
Jumlah	811.644.000	773.000.000

Rincian Beban Dibayar di Muka berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp483.850.250

C.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp483.850.250 dan Rp653.120.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	285.000.000	85.000.000
Pendapatan Jasa Pelatihan	120.000.000	215.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	78.850.250	353.120.000
Jumlah	483.850.250	653.120.000

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I disajikan dalam lampiran.

Persediaan

Rp5.100.000.000

C.12 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp5.100.000.000. dan Rp4.273.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Persediaan	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	1.765.000.000	1.785.100.000
Barang untuk Pemeliharaan	900.000.000	800.000.000
Suku cadang	900.000.000	600.000.000
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	435.000.000	415.000.000
Persediaan Lainnya	1.100.000.000	673.000.000
Jumlah	5.100.000.000	4.273.100.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp4.115.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan

/Tuntutan Ganti

Rugi

Rp432.000.000

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp432.000.000 dan Rp244.000.000. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai

bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per eselon I disajikan dalam lampiran.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp344.000.000

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp344.000.000. dan Rp257.600.000, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian TPA per eselon 1 disajikan dalam lampiran.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp13.000.000

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.000.000 dan Rp10.108.000. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	370.000.000	0,50%	1.850.000
Kurang Lancar	62.000.000	10%	6.200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	432.000.000		8.050.000
Tagihan PA			
Lancar	310.000.000	0,50%	1.550.000
Kurang Lancar	34.000.000	10%	3.400.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	344.000.000		4.950.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	776.000.000		13.000.000

Tanah
Rp36.300.000.000

C.16 Tanah
Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp36.300.000.000. dan

Rp18.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	18.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	18.338.114.000
Hibah	Rp	600.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	(638.114.000)
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	36.300.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	36.300.000.000

Mutasi tambah:

- Pembelian tanah pada tahun 2016 berlokasi di tiga provinsi yaitu: Medan, Jawa Timur dan Bali.
- Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2015.

Terdapat tanah pada:

- Sekretariat Utama BAPK seluas 3.000M2 senilai Rp3.000.000.000 pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.
- Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl Matoa No.17 pada Deputy Administrasi BAPK, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan
Mesin
Rp12.983.885.000

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.983.885.000 dan Rp6.300.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	6.300.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.600.000.000
Hibah	Rp	800.000.000
Transfer Masuk	Rp	350.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	150.000.000
Koreksi Tambah	Rp	177.885.000
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(250.000.000)
Penghapusan	Rp	(750.000.000)
Transfer Keluar	Rp	(350.000.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(194.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	12.833.885.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	(3.557.044.250)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	9.276.840.750

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa:
 1. Komputer unit dan peralatan komputer senilai Rp800.000.000.
 2. Alat angkutan darat bermotor dengan total nilai sebesar Rp5.800.000.000.
- Hibah berupa:

Alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST). Hibah tersebut sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan.
- Transfer Masuk berupa:

Komputer unit dan peralatan komputer senilai Rp350.000.000 ke Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta.
- Reklasifikasi masuk berupa:

Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali komputer unit yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp150.000.000.
- Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp277.885.000

Mutasi kurang:

- Penghentian aset berupa:

Penghentian peralatan dan mesin berupa alat pemancar dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- Penghapusan berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Darat Bermotor	350.000.000
4	Komputer Unit	250.000.000
5	Peralatan Komputer	150.000.000
Jumlah		750.000.000

- Transfer keluar berupa:
Komputer unit dan peralatan komputer senilai Rp350.000.000 dari Sekretariat Deputy Administrasi BAPK.
- Koreksi pencatatan berupa:
Pengurangan melalui koreksi karena kesalahan pencatatan senilai Rp194.000.000.
Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2016 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp47.970.000.000

C.18 Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp47.970.000.000 dan Rp42.000.000.000.
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	42.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	5.250.000.000
Koreksi pencatatan	900.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(180.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016	47.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(13.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	34.679.400.000

- Mutasi tambah:
- Pembangunan gedung berupa, pembangunan dua gedung yang akan digunakan sebagai kantor wilayah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
 - Koreksi tambah sebesar Rp900.000.000 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.

Mutasi kurang:

- Koreksi kurang sebesar Rp180.000.000 berasal dari biaya pemeliharaan tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap.

Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk musholla yang dibangun secara swadaya oleh pegawai Badan akuntansi dan Pelaporan keuangan dan pada saat ini sedang dilakukan identifikasi data untuk proses pengesahan hibah. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.040.000.000

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.040.000.000 dan Rp300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	300.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	1.740.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2016	2.040.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	1.654.000.000

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan jaringan teknologi informasi di seluruh lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp630.000.000

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp630.000.000 dan 540.000.000.

Saldo per 31 Desember 2015	540.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	120.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(30.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016	630.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(258.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	372.000.000

Mutasi tambah:

- Aset Tetap Lainnya pada tahun 2016 keseluruhannya berasal dari pengadaan sebesar Rp120.000.000 termasuk di dalamnya adalah pembelian alat musik tradisional sebesar Rp25.000.000 dan koleksi buku perpustakaan senilai Rp95.000.000.

Mutasi kurang:

- Pengurangan Rp30.000.000 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp2.250.000.000

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.250.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp17.491.644.250

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp17.491.644.250 dan Rp14.111.664.250.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.983.885.000	3.557.044.250	9.426.840.750
2	Gedung dan Bangunan	47.970.000.000	13.290.600.000	34.679.400.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.040.000.000	386.000.000	1.654.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	630.000.000	258.000.000	372.000.000
Akumulasi Penyusutan		63.623.885.000	17.491.644.250	46.132.240.750

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp1.690.000.000

C.23 Aset Tak Berwujud
 Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp1.690.000.000 dan Rp1.045.700.000, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 1.267.000.000
2	ATB Lainnya	Rp 423.000.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp 1.690.000.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2015		1.045.700.000
Mutasi tambah:		
Pembelian		794.300.000
Transfer Masuk		221.000.000
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar		(221.000.000)
Koreksi pencatatan		(150.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016		1.690.000.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2016		(173.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016		1.517.000.000

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa aplikasi manajemen database mahasiswa pada BLU di lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan aplikasi manajemen piutang di lingkup Deputy Administrasi BAPK.
- Ttransfer masuk ke Kanwil Akuntansi Istimewa Jawa Barat.

Mutasi Kurang:

- Berupa koreksi atas kesalahan pencatatan pada

tahun yang lalu.

- Transfer Keluar dari Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ke Kanwil Akuntansi Istimewa Jawa Barat.

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran.

Aset Lain-Lain **C.24 Aset Lain-Lain**

Rp1.174.000.000 Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1.174.000.000 dan Rp540.000.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Perbandingan Rincian Aset Lain-lain TA 2016

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	445.251.000
2	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	728.749.000
Jumlah		1.174.000.000

Adapun mutasi aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2015		540.000.000
Mutasi tambah:		
reklasifikasi dari aset tetap		874.000.000
Mutasi kurang:		
penggunaan kembali BMN yang dihentikan		(150.000.000)
penghapusan BMN		(90.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016		1.174.000.000
Akumulasi penyusutan		(190.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016		984.000.000

Mutasi tambah:

- Penambahan dari reklasifikasi aset tetap melalui penghentian peralatan dan mesin dari penggunaannya sebesar Rp874.000.000 dan. Peralatan dan mesin tersebut berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Angkut Darat Bermotor	495.000.000
2	Mesin	290.000.000
3	Alat Kesehatan Umum	74.000.000
4	Komputer Unit	15.000.000
Jumlah		874.000.000

Mutasi kurang:

- Berupa reklasifikasi dari aset lainnya ke peralatan dan mesin merupakan pengaktifan kembali angkutan darat bermotor dan komputer unit yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp150.000.000.
- Berupa penghapusan sebesar Rp90.000.000 merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

*Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp363.000.000*

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp363.000.000 dan Rp180.000.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	1.267.000.000	107.000.000	1.160.000.000
2	Paten	423.000.000	66.000.000	357.000.000
Jumlah		1.690.000.000	173.000.000	1.517.000.000
B	Aset Lainnya	1.174.000.000	190.000.000	984.000.000
Jumlah		1.174.000.000	190.000.000	984.000.000
Total		2.864.000.000	363.000.000	2.501.000.000

*Uang Muka dari KPPN
Rp60.000.000.*

C.26 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran

	pada tanggal pelaporan.
Utang kepada Pihak Ketiga Rp423.000.000	C.27 Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp423.000.000 dan Rp254.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp337.079.000	C.28 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp337.079.000 dan Rp186.000.000, merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin, yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan pada lampiran.
Utang Jangka Pendek Lainnya Rp288.400.000	C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp288.400.000 dan Rp141.286.000. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.
Pendapatan Diterima di Muka Rp925.000.000	C.30 Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp925.000.000 dan Rp651.935.500. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berupa jasa pelatihan dan penyusunan neraca awal belum selesai dilaksanakan hingga tanggal

pelaporan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada lampiran.

Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2016

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	425.000.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	342.500.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	157.500.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Total	925.000.000	

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran.

Beban yang Masih harus Dibayar Rp354.500.000

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp354.500.000 dan Rp455.440.250, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	42.745.000	139.000.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	184.755.000	164.090.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	127.000.000	152.350.250
Jumlah	354.500.000	455.440.250

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar berdasarkan eselon I disajikan pada lampiran.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Rp2.531.800.000

C.32 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.531.800.000 dan Rp2.868.879.000. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri berasal dari pembelian peralatan dan mesin, dan berada pada satker BLU di bawah Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri TA 2016 dan TA 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
BLU Pusat Nasional Akuntansi	1.593.300.000	2.368.000.000
Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional	938.500.000	500.879.000
Jumlah	2.531.800.000	2.868.879.000

Ekuitas

C.33 Ekuitas

Rp91.690.578.500 Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp91.690.578.500 dan Rp56.914.378.500. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 Pendapatan

PNBP

Jumlah Pendapatan pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.014.600.000 dan Rp3.613.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Rp4.014.600.000

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan TA 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	395.000.000	300.000.000	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	660.480.000	600.000.000	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	27.542.000	25.000.000	-
Jumlah Pendapatan Jasa	1.083.022.000	925.000.000	-
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	123.540.000	120.000.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	332.438.000	306.000.000	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	455.978.000	426.000.000	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	1.539.000.000	1.351.000.000	-
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	2.475.600.000	2.262.000.000	-
Jumlah Pendapatan BLU	2.475.600.000	2.262.000.000	-
Jumlah	4.014.600.000	3.613.000.000	-

Beban

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp19.820.000.000 dan Rp18.239.450.000 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	15.487.740.000	14.500.000.000	7
Beban Honorarium dan vakasi	3.409.960.000	2.900.000.000	18
Beban Lembur	922.300.000	839.450.000	10
Jumlah	19.820.000.000	18.239.450.000	9

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.000.000.000 dan Rp13.215.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	8.961.000.000	9.965.000.000	(10,08)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.275.000.000	2.389.000.000	(4,77)
Beban Persediaan Lainnya	764.000.000	861.000.000	(11,27)
Jumlah Beban Persediaan	12.000.000.000	13.215.000.000	(9,19)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.614.000.000 dan Rp6.142.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	987.400.000	1.800.000.000	-
Beban Barang Nonoperasional	564.410.000	500.000.000	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	635.411.000	450.000.000	
Beban Jasa Pos dan Giro	312.934.000	300.000.000	
Beban Jasa Konsultan	475.095.000	450.000.000	
Beban Sewa	209.250.000	742.000.000	-
Beban Jasa Profesi	715.000.000	500.000.000	
Beban Jasa Lainnya	400.500.000	350.000.000	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	712.000.000	500.000.000	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	360.000.000	350.000.000	
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	242.000.000	200.000.000	-
Jumlah	5.614.000.000	6.142.000.000	-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah

Rp5.200.000.000 masing-masing sebesar Rp5.200.000.000 dan Rp2.015.400.000 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.530.000.000	1.100.000.000	130,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.491.200.000	650.000.000	129,42
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	187.800.000	80.000.000	134,75
Beban Pemeliharaan Lainnya	991.000.000	185.400.000	434,52
Jumlah	5.200.000.000	2.015.400.000	158,01

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp9.087.000.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp9.087.000.000 dan Rp6.745.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan
TA 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.771.000.000	5.000.000.000	35,42
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.316.000.000	1.745.000.000	32,72
Jumlah	9.087.000.000	6.745.000.000	34,72

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp4.050.000.000*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.050.000.000 dan Rp3.684.100.000 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat TA 2015 dan TA 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	684.000.000	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.860.000.000		
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.506.000.000	-	-
Jumlah	4.050.000.000	-	-

- Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa P.C Unit dan peralatan komputer.
- Beban barang lainnya untuk diserahkan kepada

masyarakat/pemda berupa buku-buku antara lain Standar Akuntansi Pemerintahan, Dasar-Dasar Akuntansi dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, serta peralatan pengajaran.

Beban Bantuan Sosial
Rp600.200.000

D.8 Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp600.200.000 dan Rp750.000.000 dengan rincian sebagai berikut.
Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	90.000.000	85.000.000	5,88
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	217.000.000	215.000.000	0,93
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	293.200.000	450.000.000	-34,84
Jumlah	600.200.000	750.000.000	-19,97

- Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dimaksud dalam bentuk biaya perbaikan sekolah di daerah terpencil.
- Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial berupa pelatihan kepada masyarakat tidak mampu.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp3.510.000.000

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.510.000.000 dan Rp2.154.800.000 dengan rincian sebagai berikut.
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan TA 2015

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.102.350.000	1.394.800.000	51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	959.400.000	500.000.000	92
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	205.750.000	110.000.000	87
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	112.500.000	150.000.000	(25)
Jumlah Penyusutan	3.380.000.000	2.154.800.000	57
Beban Amortisasi Aplikasi	87.000.000	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	46.000.000	-	-
Jumlah Amortisasi	133.000.000		
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	190.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.703.000.000	2.154.800.000	72

Beban Penyisihan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016

Piutang Tak dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar
Tertagih Rp24.699.000 dan Rp10.250.000 dengan rincian sebagai
Rp24.699.000 berikut.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA
2016 dan TA 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	12.709.000	8.000.000	58,86
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	11.990.000	2.250.000	432,89
Jumlah	24.699.000	10.250.000	140,97

Kegiatan Non
Operasional
Rp38.000.000

D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan
TA 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkutan Darat Bermotor	72.000.000	66.300.000	8,60
Penjualan Alat Kantor	(9.000.000)	-	
Defisit selisih kurs	(24.000.000)	(22.500.000)	6,67
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	10.000.000	-	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	(11.000.000)	-	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	38.000.000	43.800.000	-13,24

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017

Pos Luar Biasa
Rp120.000.000

D.12. POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk Tahun
2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan TA 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	95.000.000	195.400.000	-51,38
Beban Perjalanan Dinas	(198.000.000)	(150.000.000)	32,00
Beban Persediaan	(292.000.000)	(305.100.000)	-4,29
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	(395.000.000)	(259.700.000)	52,10

Pendapatan PNBPD di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera Utara, sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan berasal dari biaya perjalanan dinas yang dihabiskan dan jumlah persediaan yang terpakai secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp56.914.378.500</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp56.914.378.500 dan Rp30.664.198.500.
<i>Defisit LO</i> <i>Rp56.248.299.000</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp56.248.299.000 dan Rp49.558.900.000.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp0</i>	E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0.
<i>Penyesuaian Nilai Aset Rp0</i>	E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp385.000.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan

harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Rp873.685.000 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp873.685.000 dan Rp764.580.000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2016

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	515.000.000
2. Suku Cadang	220.000.000
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	118.685.000
4. Barang Persediaan Lainnya	20.000.000
Jumlah	873.685.000

Selisih Revaluasi Aset Tetap **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Rp638.114.000 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp638.114.000 dan Rp350.000.000. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah di Deputi Administrasi BAP.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Rp523.885.000 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp523.885.000 dan Rp125.000.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	177.885.000	(194.000.000)	(16.115.000)
Gedung dan Bangunan	900.000.000	(180.000.000)	720.000.000
Aset Tetap Lainnya	-	(30.000.000)	(30.000.000)
Aset Tak Berwujud	-	(150.000.000)	(150.000.000)
Jumlah			523.885.000

Koreksi Lain-lain **E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31

Rp576.115.000 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp576.115.000 dan Rp1.024.500.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	132.500.000
Koreksi Pendapatan	91.500.000
Koreksi Piutang	201.000.000
Koreksi Kewajiban	96.000.000
Koreksi Hibah	55.115.000
Jumlah	576.115.000

Transaksi

Antar Entitas

Rp88.412.700.000

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp88.412.700.000 dan Rp73.410.000.000. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.850.000.000)
Ditagikan ke Entitas Lain	90.812.700.000
Transfer Masuk	(651.000.000)
Transfer Keluar	651.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	450.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	88.412.700.000

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp2.850.000.000 sedangkan DKEL sebesar Rp90.812.700.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp651.000.000 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Sekretariat Deputi Administrasi	(350.000.000)
3	Aset Tetap Lainnya	Deputi Pelatihan Akuntansi	(221.000.000)
4	Persediaan	Deputi Pelatihan Akuntansi	(80.000.000)
	Jumlah		(651.000.000)

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp651.000.000:

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Pelatihan Akuntansi Jakarta	(350.000.000)
3	Aset Tetap Lainnya	Kanwil Akuntansi Istimewa Jawa Barat	(221.000.000)
4	Persediaan	Kanwil Akuntansi Istimewa Bali	(80.000.000)
	Jumlah		(651.000.000)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Deputi Administrasi BAPK	Uang	Rp 150.000.000
		Barang	Rp 50.000.000
2	Deputi Pelatihan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Barang	Rp 150.000.000
2	Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi	Uang	Rp 100.000.000
Total Pengesahan			Rp 450.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 450.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Eselon I Tahun 2016 disajikan pada Lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp91.690.578.500

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp91.690.578.500 dan Rp56.914.378.500.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM,

dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tanggal 05 Juli 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan. Penggantian pejabat dimaksud adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitra	Syahrul F.
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Rizki
	Bendahara	Yessy	Sutanti
Kantor Akuntansi Istimewa Biak	Kuasa Pengguna Anggaran	Sutawijaya	Utami
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Fajar Utama	Okto
	Bendahara	Yanuraga	Jumina
Kantor Akuntansi Istimewa Denpasar	Kuasa Pengguna Anggaran	Astuti	Acelin Kamila
	Pejabat Pembuat Komitmen	Tira	Sugi
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Silvina	Fathin
	Bendahara	Imam	Aydin
Kantor Akuntansi Istimewa Medan	Kuasa Pengguna Anggaran	Fitriani	Wulandari
	Pejabat Pembuat Komitmen	Yudhi	Zaflan
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Hastuti	Rizvan
	Bendahara	Atmaja	Kamila

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2015	Tahun 2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016
A	Tanah						
1	Tanah	-	36.300.000.000	-	-	-	36.300.000.000
	Jumlah		36.300.000.000	-	-	-	36.300.000.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.400.000.000	374.550.000	200.000.000	574.550.000	825.450.000
2	Alat Kantor	5	4.077.885.000	203.894.250	522.500.000	726.394.250	3.351.490.750
3	Alat Rumah Tangga	5	3.991.000.000	430.000.000	572.350.000	1.002.350.000	2.988.650.000
4	Alat Komunikasi	5	850.000.000	85.000.000	170.000.000	255.000.000	595.000.000
5	Komputer Unit	4	1.200.000.000	150.000.000	300.000.000	450.000.000	750.000.000
6	Peralatan Komputer	4	1.250.000.000	156.250.000	312.500.000	468.750.000	781.250.000
7	Peralatan Olah Raga	3	215.000.000	55.000.000	25.000.000	80.000.000	135.000.000
	Jumlah		12.983.885.000	1.454.694.250	2.102.350.000	3.557.044.250	9.426.840.750
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	22.970.000.000	5.831.200.000	459.400.000	6.290.600.000	16.679.400.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	25.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	7.000.000.000	18.000.000.000
	Jumlah		47.970.000.000	12.331.200.000	959.400.000	13.290.600.000	34.679.400.000
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	40	250.000.000	56.250.000	16.250.000	72.500.000	177.500.000
2	Jaringan Telepon	20	1.790.000.000	124.000.000	189.500.000	313.500.000	1.476.500.000
	Jumlah		2.040.000.000	180.250.000	205.750.000	386.000.000	1.654.000.000
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian	4	450.000.000	145.500.000	112.500.000	258.000.000	192.000.000
2	Buku dan Koleksi Kepustakaan	-	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Jumlah		630.000.000	145.500.000	112.500.000	258.000.000	372.000.000
F	Konstruksi dalam Pengerjaan						
1	KDP Bangunan	-	2.250.000.000	-	-	-	2.250.000.000
	Jumlah		2.250.000.000	-	-	-	2.250.000.000
	Total		102.173.885.000	14.111.644.250	3.380.000.000	17.491.644.250	84.682.240.750

Lampiran II: Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No	Uraian	Lokasi	Nilai Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
1	Gedung Tempat Kerja	Kanwil Al Papua	No.25/KWAl/VII/2015	500.000.000	75%	375.000.000	
2	Gedung Tempat Kerja	Kanwil Al Jakarta	No. 05/DAlVI/2015	1.200.000.000	25%	300.000.000	
3	Gedung Tempat Kerja	Sekretariat Deputy Administrasi	No. 011/Dadm/III/2015	900.000.000	25%	225.000.000	
4	Gedung Tempat Kerja	Sekretariat Deputy Pelatihan	No. 039/Dpel/XII/2015	1.500.000.000	30%	450.000.000	
5	Gedung Tempat Kerja	Sekretariat Deputy Pelatihan	No. 023/Dpel/XII/2016	750.000.000	10%	75.000.000	
6	Gedung Tempat Tinggal	Kanwil Al Merauka	No. 09/KWAl/VI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	
7	Gedung Tempat Tinggal	Kanwil Al Bali	No. 17/XII/2015	900.000.000	50%	450.000.000	
Jumlah				6.250.000.000		2.250.000.000	

Lampiran III: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2016

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Deputi Administrasi BAPK	Uang	DN	Rp 450.000.000	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000	Proses Pengesahan
		Barang	DN	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Belum Diregister
2	Deputi Sistem Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPeraturan Akuntansi	Uang	DN	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	Belum diregister
		Barang	LN	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp -	
3	Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi	Uang	LN	Rp 500.000.000	Rp 100.000.000	Rp 400.000.000	Proses Pengesahan
		Barang	DN	Rp 430.000.000		Rp 430.000.000	Belum diregister
Jumlah				Rp 1.730.000.000	Rp 450.000.000	Rp 1.280.000.000	